

Polibisnis, Volume 7 No.1 April 2015

PEMBERDAYAAN PEKERJA ANAK DENGAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN PADA PESANTREN DI SUMATERA BARAT

Eva Yoyet

Dosen Politeknik Negeri Padang Jurusan Administrasi Niaga

Email : eva_yoyet@yahoo.com

Ermatati Hatta

Dosen Politeknik Negeri Padang Jurusan Akuntansi

Email : Ermatati.hatta@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to look at the role of schools in educating students including child labor by providing entrepreneurial science beside the science of religious education. Boarding school sample is salafiah boarding schools and modern boarding school that exist in some location in west sumatra. Through collecting data are interview the owners / leaders of pesantren and child laborers in every location of research by qualitative methods, the result show that it's significant for the students after finished the school. Meaning that the entrepreneurship knowledge in the school become it's something important for them to make them independent. This research was conducted for one year in 2014 to produce new insights into the debriefing method of child labor through education in schools independence through entrepreneurship.

Keywords: boarding, entrepreneurship, child labor, students

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meskipun sudah ada pembatasan dan bahkan Undang-undang yang mengatur masalah pekerja anak namun pekerja anak banyak juga terdapat pada sebahagian besar negara, banyak anak-anak yang bekerja yang seharusnya masih usia sekolah. Banyak negara menyoroti terhadap eksploitasi yang dilakukan terhadap anak. Kantor Perburuhan Internasional melaporkan bahwa anak-anak bekerja dengan jam terpanjang dan yang terburuk adalah dengan gaji terendah dari semua buruh (Bequale dan Boyden 1988). Padahal dalam bekerja mereka bertahan dengan menghadapi bahaya kondisi kerja yang meliputi bahaya kesehatan dan potensi penyalahgunaan peralatan yang belum sesuai dengan usianya. Beberapa pengusaha didunia seolah-olah memanfaatkan kepatuhan dari anak-anak dengan mengatakan bahwa serikat buruh yang ada selama ini belum mampu melindungi pekerja anak dalam menuntut hak mereka sehingga mereka sulit untuk berubah.

Pekerja anak adalah masalah yang selama ini sudah menjadi masalah nasional baik dipandang sebagai aspek sosial maupun dari pandangan aspek hukum. Sudah begitu banyak baik Undang-Undang ataupun aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya untuk mampu mengatasi masalah pekerja anak di Indonesia namun belum berhasil dengan baik. Ini terlihat dari banyaknya permasalahan pekerja anak yang mencuat kepublik yang sudah jauh dari tanggung jawab Undang-Undang terhadap perlindungan pada anak-anak Indonesia yang seharusnya mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan yang layak. Persoalan pekerja anak bukanlah masalah

yang simpel namun sudah menjadi masalah nasional yang tidak kunjung reda. Buktinya banyak kebijakan yang selama ini atas nama perlindungan terhadap pekerja anak sudah dilakukan namun belum sepenuhnya mampu memberikan hak-hak pada anak-anak yang bekerja yang belum pada batas usia yang seharusnya.

Selama ini Indonesia telah mempunyai begitu banyak peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak baik secara nasional dengan tujuan agar anak-anak mampu hidup layak pada masa usia yang muda dalam mendapatkan hak untuk sekolah. Undang-Undang yang mengatur masalah ini diantaranya UUD 1945, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Banyaknya Undang-undang atau aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah ternyata belum mampu sepenuhnya untuk mengatasi masalah pekerja anak ini. Justru masyarakat dalam konteks kehidupan sosial menganggap pekerja anak bukanlah masalah melainkan suatu kewajiban bagi seorang anak dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui bekerja. Hal ini tentu menjadi persoalan yang serius, bagaimana pemerintah sebagai regulator dalam menjalankan kewajiban dengan melindungi hak-hak anak namun tidak sejalan dengan pandangan masyarakat yang membiarkan hal ini terjadi disekelilingnya. Terjadinya ketidak selarasan ini tentu sangat menghambat di dalam pencapaian tujuan untuk melindungi anak-anak pada masa emasnya yang sebenarnya berhak mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk hidup yang layak namun buyar karena banyaknya tuntutan hidup yang ditanggung dengan berbagai alasan sehingga anak-anak banyak yang bekerja.

Berdasarkan data dari BPS pada bulan Oktober 2000, jumlah pekerja anak usia 10-14 tahun tercatat sebanyak 2,05 juta, dan terus turun hingga pada Oktober 2005 menjadi 1,64 juta jiwa. Setelah krisis tahun 1998 maka pada tahun 2006 terjadi peningkatan menjadi 1,81 juta dan pada tahun 2007 mencapai angka 2,21 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2008 mencapai angka 5,75 juta jiwa. Jumlah tersebut akan jauh lebih besar jika dihitung pekerja anak yang berusia dibawah 10 tahun dan diatas 14 tahun (Haryadi, 1995: 20). Hal ini seharusnya mampu membuka mata kita semua bahwa masalah pekerja anak bukan lagi masalah sosial biasa tetapi telah menjadi masalah nasional bahkan internasional yang harus mampu untuk dituntaskan.

Di Sumatera Barat masalah pekerja anak juga masalah yang sangat besar, dan bahkan jika dilihat dari fenomena kehidupan sehari-hari jumlah pekerja anak ini terus bertambah apalagi setelah terjadinya gempa tahun 2009. Banyak tempat yang sebelumnya bersih dari pekerja anak sekarang sudah penuh dan bahkan jumlahnya semakin banyak seperti di prampatan jalan, di SPBU, lampu merah, dipasar, di depan swalayan ataupun ditempat-tempat lainnya. Seharusnya fenomena ini menjadi dasar bagi pemerintah agar permasalahan ini mampu secepatnya diatasi tentu dengan kebijakan-kebijakan yang populer dan bukan hanya sekedar berbuat saja dan untuk mengatasi masalah sesaat.

Sumatera Barat adalah salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai sejarah islam yang sampai saat ini masih dipandang beragam karena masuk islam di Sumatera Barat masih diperdebatkan apakah melalui pedagang atau saudagar atau malah perjuangan dari masyarakat Minang sendiri seperti adanya perlawanan perang paderi yang sangat terkenal selama ini yang merupakan salah satu pahlawan islam. Bukti

bahwa Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang mempunyai history islam yang panjang adalah dengan banyaknya pesantren-pesantren berdiri di daerah ini dengan umur yang panjang, seperti berdiri lebih dari satu abad lamanya dan bahkan ada yang mencapai dua abad.

Melihat kehidupan pesantren yang saat ini masih kental dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Minang tentu tidak bisa dipandang sebagai suatu tempat pendidikan biasa karena keberadaan pesantren selama ini sudah mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitarnya. Begitu besarnya keberadaan pesantren mempengaruhi kehidupana masyarakat Sumatera Barat khususnya masyarakat Minang tentu beralasan karena pada beberapa daerah justru begitu banyak jumlah pesantren berdiri. Saat ini jumlah pesantren yang ada di Sumatera Barat berjumlah 206 buah dengan berbagai tipe pesantren dan yang paling banyak jumlahnya berada di Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebanyak 40 buah pesantren dan begitu juga menyebar pada beberapa daerah lainnya di Sumatera Barat (Kemenag, 2013).

Selama ini pesantren juga mempunyai kewajiban yang sama dengan tempat pendidikan lainnya yaitu seperti sekolah negeri dengan mendidik santri untuk mampu mempelajari ilmu yang sesuai dengan kurikulum yang diajarkan. Pesantren ini terdiri dari beberapa tipe, ada yang mempunyai tipe salafiyah, tipe Ashryah dan ada juga tipe kombinasi atau modern. Tetapi di dalam menjalankan pendidikannya ada tipe pesantren tertentu justru tidak bergantung pada pemerintah baik dalam menjalankan kurikulum bahkan dalam mendapatkan biaya operasional menjalankan pesantren. Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah bermacam-macam, alasan pertama menurut pemerintah ada beberapa pesantren tidak mau dibantu oleh pemerintah, alasan lainnya pemerintah menganggap keberadaan pesantren banyak yang tidak terdaftar. Padahal dalam kenyataannya pendidikan yang dilakukan dipesantren tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan di tempat pendidikan lainnya yaitu mendidik dan bahkan dipesantren salafiah anak-anak yang menjadi santri adalah anak-anak yang pada umumnya berasal dari keluarga yang tidak mampu dan bahkan banyak yang berasal dari anak jalanan, pekerja anak, anak yatim/piatu dan bahkan anak-anak yang sudah tidak mampu ditampung ditempat lain.

Ada yang menarik selama ini yang terjadi di beberapa pesantren salafiah, pesantren mampu menyiapkan santri agar mampu hidup mandiri setelah selesai menuntut ilmu dengan ilmu dan keterampilan wirausaha sehingga para alumni yang sudah tamat dari pesnatren banyak yang mandiri dengan bekal keterampilan kewirausahaan yang diberikan oleh pesantren. Pertanyaannya adalah bagaimana peran pemerintah terhadap keberadaan peantren ini yang justru apa yang dilakukan sangat luar biasa dibandingkan dari tempat pendidikan lain namun belum ada suatu kebijakan yang mampu dibuat oleh pemerintah dalam membangun pendidikan pesantren yang mandiri dan mampu mendidik santri menjadi santri yang mandiri dan bermental yang kokoh.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskriptifkan bagaimana pendidikan yang ada dipesantren mampu menampung pekerja anak menjadi santri yang berpendidikan mandiri dengan pendidikan kewirausahaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pekerja Anak

Pekerja anak merupakan fenomena sosial baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Munculnya pengertian pekerja anak dapat dilihat dari bermacam-macam

sisi, bisa dilihat dari faktor umur ataupun dilihat dari tingkat kematangan dalam pendidikan. Usia anak mampu memisahkan anak dengan orang dewasa. Pengertian anak masih dipandang beragam oleh lembaga-lembaga nasional maupun internasional, seperti lembaga internasional Department of Child and Adolescent Health and Development mendefinisikan anak-anak sebagai orang yang berusia di bawah 20 tahun. Sedangkan The Convention on the Rights of the Child mendefinisikan anak-anak sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun. Pengertian lain menurut WHO (2003), mendefinisikan anak-anak berada antara usia 0–14 tahun karena di usia inilah risiko cenderung menjadi besar.

Pandangan lain di kemukakan oleh Badan Pusat Statistik yang membagi anak pada beberapa kategori yaitu menurut umur usia muda, usia produktif dan usia tua. Lebih lanjut BPS menerangkan komposisi penduduk Indonesia menurut kelompok umur terdiri dari penduduk berusia muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun) dan usia tua (≥ 65 tahun). Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam konvensi ILO menetapkan beberapa usia anak-anak tidak boleh untuk bekerja yaitu kisaran usia minimum yang menetapkan anak-anak tidak boleh bekerja. Usia minimum menurut Konvensi ILO no 138 untuk negara-negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5 – 11 tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomika ini sudah termasuk pekerja anak. Anak-anak usia 12 – 14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan. Sedangkan usia sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya. Untuk pengertian lainnya juga berbeda seperti Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggunakan istilah anak-anak yang terpaksa bekerja bagi pekerja anak sedangkan Biro Pusat Statistik menggunakan istilah anak-anak yang aktif secara ekonomi yang disebut dengan pekerja anak.

Pengertian pekerja anak masih banyak menimbulkan perdebatan baik dikalangan lembaga peduli anak maupun dalam konteks keilmuan namun meskipun begitu istilah pekerja anak sama-sama digunakan untuk menggantikan istilah buruh anak. Setiap instansi ataupun lembaga baik internasional maupun nasional menggunakan istilah pekerja anak dalam pengertian yang berbeda-beda. Pengertian dari Lembaga Internasional seperti ILO/IPEC mendefinisikan Pekerja Anak adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral. Konsep ini didasarkan pada Konvensi ILO no 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan anak bekerja yang menggambarkan definisi internasional yang paling komprehensif tentang usia minimum untuk memperbolehkan anak bekerja yang intinya mengacu secara tidak langsung pada kegiatan ekonomi. Pandangan lain yang dikemukakan oleh ILO adanya pembagian kondisi pekerjaan yaitu yang dinamakan pekerjaan ringan dalam konvensi no 138 Pasal 7, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan ringan yaitu tidak boleh mengganggu kesehatan dan pertumbuhan anak atau mengganggu sekolahnya serta berpartisipasi dalam pelatihan kejuruan atau kapasitas untuk memperoleh manfaat dari instruksi yang diterimanya. Lebih lanjut dalam istilah ini dijelaskan bahwa tugas yang dilaksanakan dalam pekerjaan ringan tidak boleh merupakan pekerjaan yang berbahaya dan tidak boleh lebih dari 14 jam per minggu. Fenomena lain yang terjadi, persoalannya di Indonesia saat ini adalah pengelompokan anak dalam bekerja tidak pernah dilakukan atau bahkan jarang diatur oleh pemerintah sehingga semua anak yang bekerja termasuk pekerja

anak, hal ini tentu saja menimbulkan polemik dalam mendefinisikan pekerja anak yang sesungguhnya.

2.2 Pengertian Pesantren

Didalam memandang persoalan pekerja anak dengan dididik di pesantren bukan hanya menjadi seorang kyai tetapi juga menjadi seorang wirausaha maka akan di paparkan bagaimana tipologi dari pesantren yang ada saat ini dan dapat dilihat apakah mampu beradaptasi sehingga bisa menjadi seorang santri yang mandiri. Untuk itu dibawah ini akan di paparkan beberapa pandangan mengenai pesantren yang dibagi kepada dua pandangan yaitu pesantren salafiah dan pesantren modern.

a. Pesantren Salafiyah

Pesantren salafiah sebenarnya adalah pesantren yang sudah berdiri sangat lama dan bahkan ada yang sudah berdiri selama 200 tahun. Pesantren salafi, yaitu pesantren yang tetap mempertahankan pelajarannya dengan kitab-kitab klasik, dan tanpa diberikan pengetahuan umum dan walaupun ada pengetahuan umum yang diberikan hanya sebahagia kecil saja tetapi yang paling banyak adalah pelajaran agama. Model pengajarannya pun sebagaimana yang lazim diterapkan dalam pesantren salaf, yaitu berdasarkan pengajian yang diberikan wajib oleh gurunya (*weton*) dan juga pengajian yang diminta oleh santri untuk diajarkan (*sorogan*). *Weton* adalah pengajian yang inisiatifnya berasal dari kyai sendiri, baik dalam menentukan tempat, waktu, maupun lebih-lebih kitabnya. Sedangkan *sorogan* adalah pengajian yang merupakan permintaan dari seseorang atau beberapa orang santri kepada kyainya untuk diajarkan kitab-kitab tertentu. Sedangkan istilah salaf ini bagi kalangan pesantren mengacu kepada pengertian “pesantren tradisional” yang justru sarat dengan pandangan dunia dan praktek islam sebagai warisan sejarah, khususnya dalam bidang syari’ah dan tasawwuf (Irwaldi, 2012).

Pada pesantren salafiah para santri diberikan pelajaran keagamaan itu sebesar 80% dan sebanyak 20% akan diberikan pengetahuan umum. Pengetahuan umum yang diberikan itu gunanya adalah untuk dapat mempersiapkan para santri agar mampu mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak pesantren salafiah yang kita temui saat ini membangun pesantrennya dengan mencari pendanaan sendiri sedangkan santri yang diterima untuk belajar pada pesantren ini hanya datang dengan tidak mempunyai uang sedikitpun. Siapapun dan dari manapun asal santri akan diterima di pesantren ini dan bahkan akhir-akhir ini bagi pesantren yang berada di daerah pedesaan akan menerima semua santri yang datang dan tidak pernah menolak walau hanya datang dengan modal semangat saja. Pendanaan di dalam menjalankan operasional pesantren biasanya dilakukan dengan mengajarkan kewirausahaan pada santri dan kalau mereka sudah punya ilmu wirausaha maka mereka akan berwirausaha di samping belajar agama.

Kurikulum yang di ajarkan pada pesantren ini sangat berbeda dengan pesantren modern tetapi para santri akhirnya nanti juga akan mempunyai ijazah sebagai tanda menamatkan sekolah atau pendidikan yang dikeluarkan oleh departemen agama bekerjasama dengan departemen pendidikan.

Di Sumatera Barat keberadaan pesantren ini sangat banyak saat ini berjumlah 206 buah pesantren dan pada umumnya sudah lama berdiri dan sampai sekarang sangat aktif di dalam menjalankan pendidikan (Kemenag, 2015). Persoalan utama yang muncul adalah susah pesantren di dalam mendapatkan dana di dalam menjalankan pesantren ini karena santri yang datang kesini tidak membayar sedangkan pemerintah daerah tidak punya kebijakan di dalam mengembangkan pesantren ini padahal pesantren

salafiah mampu meletakkan akhlak yang baik untuk anak-anak. Kurangnya perhatian pemerintah ke pada pesantren salafiah ini terlihat dari tidak adanya bantuan pemerintah di dalam memberikan bantuan berupa dana ataupun untuk pembangunan fisik sehingga kelihatan pemerintah tidak punya konsep di dalam memajukan pendidikan nasional sedangkan untuk sekolah negeri di berikan bantuan penuh padahal pesantren juga untuk mendidik anak bangsa. Saat ini yang terlihat yang dilakukan bagi pesantren adalah mendidik anak agar mampu memenuhi kebutuhan sendiri yaitu dengan pendidikan kewirausahaan.

Keadaan yang menjadi kendala diatas membuat para santri berinisiatif di dalam memikirkan kebutuhan hidup sendiri sehingga tidak sedikit dari mereka terjun menjadi wirausaha, walaupun awalnya hanya sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup saja tetapi di dalam perkembangan waktu banyak juga akhirnya yang berhasil.

b. Pondok pesantren modern (khalaf)

Saat ini sudah banyak terjadi perubahan pada pesantren, bisa saja karena pengaruh kemajuan dari karakteristik pesantren itu sendiri atau dipengaruhi oleh tuntutan pendidikan. Ada beberapa hal yang menjadi alasan terjadinya perubahan pada model pesantren, diantaranya:

1. Terjadinya peningkatan jumlah secara kuantitas terhadap keberadaan pesantren di Indonesia.
2. Menyangkut penyelenggaraan pendidikan. Perkembangan bentuk-bentuk pendidikan di pesantren tersebut diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: (a) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan maupun yang juga memiliki sekolah umum, (b) pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan agama dalam bentuk Madrasah Diniyah, (c) pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian, (d) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk Madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional.

Dengan terjadinya perkembangan pendidikan yang cepat maka juga akan berdampak terhadap kurikulum yang di berlakukan pada pondok pesantren. Kalau kita ingin melihat sejarah dari pesantren banyak pesantren salafiah awalnya dan berubah menjadi pesantren modern. Ini bisa saja akibat dari tuntutan dari pendidikan di negara kita yang harus memenuhi persyaratan yang cukup banyak di dalam melanjutkan studi. Perbedaan pesantren modern dan salafiah sangat terlihat dan menjadi suatu perbedaan yang sangat dominan untuk di uraikan. Pesantren modern mempunyai beberapa perbedaan sebagai berikut:

1. Kurikulum pembelajaran yang di adopsi sama dengan sekolah umum tetapi karena berbentuk pesantren maka mata pelajaran agama punya prioritas yang sama untuk diberikan kepada anak didik. Antara kurikulum umum dan berbasis pesantren akan dilakukan sama banyak sehingga pembelajaran agama tidak terabaikan. Prioritas pendidikan pada sistem sekolah formal dan penekanan bahasa Arab modern (lebih spesifik pada speaking/muhawarah).
2. Pelajaran yang seperti pada pesantren salafiah seperti sistem pengajian kitab kuning, baik pengajian sorogan wetonan maupun madrasah diniyah, ditinggalkan sama sekali. Atau minimal kalau ada, tidak wajib diikuti. Walaupun

demikian, secara kultural tetap mempertahankan ke-NU-annya seperti tahlilan, qunut, yasinan, dll (Irvawaldi, 2012).

Sebenarnya mengenai pengertian pondok pesantren modern memiliki pengertian atau konotasi yang bermacam-macam. Belum ada definisi dan pembatasan atau kriteria pasti tentang pondok pesantren seperti apa yang memenuhi atau patut disebut dengan pesantren modern. Namun demikian, beberapa unsur yang menjadi ciri khas pondok pesantren modern yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Penekanan pada bahasa Arab percakapan, satri diberikan atau diarahkan untuk dapat menguasai bahasa Arab dengan praktek setiap hari atau sesuai dengan aturan pondok pesantren gunanya untuk dapat membiasakan santri menggunakan bahasa Arab.
- b. Memakai buku-buku literatur bahasa Arab kontemporer (bukan klasik/kitab kuning). Buku yang dipakai di dalam pembelajaran tidak lagi seperti pada pendidikan salafi tetapi sudah memakai literatur bahasa Arab kontemporer.
- c. Memiliki sekolah formal di bawah kurikulum Diknas dan/atau Kemenag
- d. Tidak lagi memakai sistem pengajian tradisional seperti sorogan, wetonan, dan bandongan.

Kadang-kala kriteria-kriteria di atas belum tentu terpenuhi semua pada sebuah pesantren yang mengklaim modern tetapi walau demikian bisa juga dilihat dari kegiatan yang dominan diadopsi oleh pesantren tersebut. Kita lihat seperti yang di tulis Irvawaldi (2012) mengenai Pondok modern Gontor, inventor dari istilah pondok modern, umpamanya, yang ciri modern-nya terletak pada penggunaan bahasa Arab kontemporer (percakapan) secara aktif dan cara berpakaian yang meniru Barat. Tapi, tidak memiliki sekolah formal yang kurikulumnya diakui pemerintah.

2.3 Pengertian Kewirausahaan

Saat ini kewirausahaan adalah salah satu potensi yang mesti dikembangkan. John Kao (1991:14) dalam Sudjana (2004:131) menyebutkan bahwa "*Entrepreneurship* adalah sikap dan perilaku wirausaha". Wirausaha ialah orang yang inovatif, antisipatif, inisiatif, pengambil risiko dan berorientasi laba. Ini berarti kewirausahaan merupakan sikap dan perilaku orang yang inovatif, antisipatif, inisiatif, pengambil risiko dan berorientasi laba. Sedangkan menurut Hisrich et al. (2005) Kewirausahaan adalah suatu proses dinamis atas penciptaan tambahan kekayaan. Kekayaan diciptakan oleh individu yang berani mengambil resiko utama dengan syarat-syarat yang wajar, waktu, dan atau komitmen karier atau penyediaan nilai untuk berbagai barang dan jasa. Produk dan jasa tersebut tidak mungkin baru atau unik, tetapi nilai tersebut bagaimanapun juga harus dipompa oleh usahawan dengan penerimaan dan penempatan kebutuhan keterampilan dan sumber-sumber daya.

Dapat disimpulkan berkewirausahaan adalah hal-hal atau upaya yang berkaitan dengan penciptaan kegiatan atau usaha atau aktivitas bisnis dengan kemauan dan kemampuan sendiri. Wirausaha atau wiraswasta adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat kewirausahaan atau kewiraswastaan dan umumnya memiliki keberanian dalam mengambil risiko terutama dalam menangani usaha atau perusahaannya dengan berpijak pada kemampuan dan atau kemauan sendiri. Manfaat Kewirausahaan menurut Zimmerer *et al.* (2005) adalah Memberikan peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri, Memberikan peluang untuk melakukan perubahan, Memberikan peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya, Memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin, Memiliki peran untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan

pengakuan atas usahanya, dan Memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama satu tahun yaitu tahun 2014 dengan lokasi penelitian Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang dan Kabupaten Agam. Pengambilan lokasi pada daerah ini adalah berdasarkan pertimbangan bahwa pesantren yang paling banyak jumlahnya menurut data di Kemenag 2013 adalah Kabupaten Padang Pariaman. Alasan selanjutnya adalah daerah ini merupakan daerah yang termasuk parah dalam bencana gempa tahun 2009.

3.2 Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel berdasarkan *purposive sampling* dengan pertimbangan mampu mengungkap tujuan penelitian yang dilakukan yaitu untuk mampu melihat bagaimana pekerja anak dapat memperoleh pendidikan dipesantren dengan berwirausaha untuk menuju kemandirian. Sampel untuk anak jalanan berjumlah 25 orang tiap lokasi dan jumlah pesantren yang di wawancarai berjumlah 4 pesantren pada setian lokasi.

3.3 Metode Analisis Data

Data diolah dengan metode kualitatif setelah data dikumpulkan dengan cara indept-interview, observasi dan dokumentasi.

4. PEMBAHASAN

Pekerja anak melakukan pekerjaan tertentu sebagai aktifitas rutin harian, jam kerjanya relatif panjang. Ini menyebabkan mereka tidak dapat bersekolah, tidak memiliki waktu yang cukup untuk bermain dan beristirahat, dan secara tidak langsung aktifitas tersebut berbahaya bagi kesehatan anak. Sedangkan anak bekerja, mereka melakukan aktifitas pekerjaan hanya sebagai latihan. Kegiatan tersebut tidak dilakukan setiap hari, jam kerja yang digunakan juga sangat pendek, dan aktifitasnya tidak membahayakan bagi kesehatan anak serta mendapatkan pengawasan dari orang yang lebih dewasa atau ahlinya. Dalam hal ini anak masih melakukan aktifitas rutinnnya seperti sekolah, bermain dan beristirahat.

Keterlibatan anak dalam dunia kerja tidaklah terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab tersebut ada yang berasal dari dalam diri anak maupun karena pengaruh lingkungan terdekat dengan anak. Secara garis besar faktor penyebab ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong merupakan faktor yang berasal dari dalam diri si anak, yang mendorong anak untuk melakukan aktifitas tertentu yang menghasilkan uang. Dengan hasil yang diperoleh anak akan menjadi senang dan dorongan tersebut akan terpuaskan. Faktor pendorong yang menyebabkan anak memilih menjadi pekerja anak antara lain : kemiskinan yang dialami orangtua, adanya budaya dan tardisi yang memandang anak wajib melakukan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian kepada orangtua, relatif sulitnya akses ke pendidikan, tersedianya pekerjaan yang mudah diakses tanpa membutuhkan persyaratan tertentu, dan tidak tersedianya fasilitas penitipan anak pada saat orangtua bekerja.

Faktor penarik adalah faktor yang berasal dari luar diri anak. Faktor inilah yang menjadi alasan bagi dunia kerja untuk menerima anak bekerja. Anak dipandang sebagai tenaga kerja yang murah dan cenderung tidak banyak menuntut. Pekerja anak dipandang tidak memiliki kemampuan yang memadai, baik secara fisik maupun kemampuan. Dengan demikian para pengusaha akan cenderung memilih anak karena upah yang diberikan akan cenderung lebih murah dari pada orang dewasa. Disamping itu anak lebih patuh dan penurut terhadap instruksi yang diberikan oleh orang dewasa.

Selain beberapa faktor diatas, penyebab anak memasuki dunia kerja dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain : ekonomi, sosial, budaya dan faktor-faktor lain. Dari faktor ekonomi, kemiskinan keluarga menyebabkan ketidak mampuannya dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kondisi ini menyebabkan anak dengan kesadaran sendiri atau dipaksa oleh keluarga untuk bekerja, sehingga kebutuhan pokoknya dapat terpenuhi dan membantu keluarga dalam mencari nafkah. Secara sosial ketidak harmonisan hubungan antar anggota keluarga dan pengaruh pergaulan dengan teman, merupakan faktor yang menyebabkan anak bekerja. Bagi anak, bekerja bukan sekedar kegiatan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Tetapi juga sebagai pelampiasan atas ketidak harmonisan hubungan diantara anggota keluarga. Disamping itu pekerjaan dan teman-teman di tempat bekerja merupakan tempat yang dapat dijadikan tempat bergantung bagi anak.

Faktor budaya yang menyebabkan anak bekerja adalah adanya pandangan dari sebagian masyarakat yang lebih menghargai anak yang bekerja. Mereka menganggap bahwa anak yang bekerja merupakan bentuk pengabdian kepada orangtua. Faktor-faktor lain yang turut menjadi penyebab anak memasuki dunia kerja adalah tersedianya sumber lokal yang dapat menjadi lahan pekerjaan bagi anak, pola rekrutmen yang mudah dan anak merupakan tenaga kerja yang murah dan mudah diatur.

Dampak dari pekerja anak yang secara tidak langsung akan ditanggung oleh masyarakat dan negara antara lain : *pertama*, anak tidak memiliki bekal pendidikan dan keterampilan yang memadai, sehingga akan memperpanjang siklus kemiskinan yang selama ini sudah dialami keluarga anak. *Kedua*, Anak yang bekerja pada usia dini akan cenderung memiliki fisik yang lebih rapuh, merasa takut dan tidak memiliki rasa percaya diri ketika berinteraksi dengan orang lain yang baru dikenalnya.

Memperhatikan pada dampak negatif terhadap perkembangan anak tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pekerja anak merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian berbagai pihak. Masalah pekerja anak bukanlah masalah yang memiliki faktor penyebab tunggal, sehingga penanganannya pun perlu melibatkan beberapa pihak yang berhubungan dengan anak. Pandangan yang mempermasalahkan pekerja anak juga dapat dilihat dari perspektif hak anak. Perspektif hak anak memandang bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara Internasional. Setiap anak tanpa terkecuali memiliki 4 hak dasar yang meliputi : hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Hak untuk tumbuh kembang merupakan hak anak untuk memperoleh pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.

Membiarkan anak untuk menjadi pekerja anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak, terutama hak untuk berkembang. Pekerja anak menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja. Ini menyebabkan mereka tidak memiliki kesempatan lagi untuk memperoleh pendidikan, melakukan aktifitas yang berkaitan dengan seni dan budaya, tidak memiliki waktu luang yang memungkinkannya untuk bersosialisasi

dengan teman sebaya dan cenderung berada pada situasi yang berbahaya bagi kelangsungan hidupnya.

Pesantren yang merupakan tempat santri selama ini menuntut ilmu ternyata mampu mengantarkan santrinya untuk hidup mandiri sebagai wirausaha. Sumatera Barat yang saat ini mempunyai pesantren sebanyak 206 buah yang terdiri dari pesantren slaafiah dan pesantren modern ternyata mampu menampung pekerja anak untuk menuntut ilmu di pesantren. Menurut penelitian yang penulis lakukan pada tiga lokasi penelitian terdapat tiga pesantren yang merupakan pesantren salafiah dan selama ini sudah mampu menampung pekerja anak dengan fokus pada pembinaan kewirausahaan seperti pesantren Isafat di Kota Padang, Pesantren Darul Ulum di Kabupaten Padang Pariaman dan juga ada beberapa pesantren lagi tetapi hanya sebatas mengajarkan kewirausahaan dengan cara tradisional saja.

Pembelajaran dipesantren salafiah memang berbeda dengan pesantren modern baik dalam kurikulum maupun di dalam melakukan pendekatan guru dengan santri. Tetapi untuk pesantren yang menampung pekerja anak adalah pesantren salafiah yang mana selama ini pemerintah memberikan perhatian yang berbeda baik dalam masalah pendanaan maupun dalam pengakuan keberadaan pesantren. Untuk pesantren modern diperlakukan sama dengan pendidikan negeri yang diberi dana baik dana Bos maupun dana pembangunan sekolah atau asrama namun untuk pesantren salafiah justru sebaliknya dan bahkan pada umumnya pesantren salafiah ini belum ada yang diberi bantuan oleh pemerintah.

Menurut hasil wawancara dengan Kemenag Kabupaten dan Kota mengatakan bahwa keberadaan pesantren salafiah ini memang susah untuk diberikan bantuan finansial karena menurut aturan Kementrian Agama RI ijazah hasil belajar di pesantren salafiah hanya dihargai sebagai ijazah dalam bentuk paket saja padahal mereka mempunyai jam belajar yang lebih banyak dari pada sekolah negeri. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama yang menginginkan pesantren menjadi salah satu tempat menampung pekerja anak untuk dapat didik menjadi manusia yang mandiri dengan berwirausaha.

Kebedaan pekerja anak yang mampu hidup di pesantren sebenarnya harus dihargai karena selama ini pemerintah saja belum mampu memberikan solusi yang baik bagi penanganan pekerja anak karena membuat rumah singgah dan memasukan mereka ke panti asuhan ternyata tidak memberikan mereka kehidupan yang lebih baik sedangkan bagi pesantren salafiah mereka datang kepesantren dengan keinginan sendiri dan tanpa di pungut biaya satu sen pun sehingga kemerdekaan sebagai anak sangat dinikmati oleh anak dan menjadikan pesantren tempat yang cocok bagi beberapa santri. Menurut hasil wawancara dengan santri mengatakan bahwa dipesantren mereka mempunyai tujuan hidup yang jelas dengan dibekali oleh ilmu agama yang dalam lalu diberikan pembekalan kewirausahaan untuk mampu hidup mandiri setelah selesai menimba ilmu. Kewirausahaan yang selama ini dilakukan oleh santri diantaranya ilmu pertanian, ilmu pembudidayaan ikan, ilmu memproduksi produk seperti memproduksi kerupuk talas, bertukang dan lainnya. Ada juga beberapa pesantren yang membekali dengan keahlian menjahit karena Kyai yang mempunyai pondok pesantren pandai menjahit.

Keadaan seperti itu seharusnya mampu membuka mata pemerintah untuk segera membuat program yang mampu mengangkat keberadaan pesantren salafiah yang selama ini yang sudah terbukti dapat mendidik santrinya hanya dengan berdasarkan kerja keras dan tanpa pamrih dengan hasil yang luar biasa. Tetapi walaupun banyak alasan pemerintah tentang legalitas pesantren salafiah yang selama ini menjadi alasan

diabaikan sebetulnya inilah tugas pemerintah dalam mendidik pekerja anak untuk mampu hidup lebih mandiri melalui pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2013

Bequele, A. and J. Boyden. 1988. "*Working Children: Current Trends and Policy Responses.*" *International Labor Review* 127,2: 153-171.

Kementrian Agama, 2013

Hisrich, 1991., *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha*, Earlangga Jakarta.

Suryana., 2006, *Kewirausahaan.*, Salemba Empat

Zimmerer.,1998., *Pengantar kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil*, Universitas Kristen Petru.